

Bulan :

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 |
|---|---|---|---|



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

| | |
|--------------|---------|
| Media Online | |
| Media Cetak | Indopos |

Pemprov Gelontorkan Rp 171 M

Hasil padanan data antara data PPDB yang tidak diterima di negeri, artinya mereka diterima di swasta dan data bansos adalah 85.508”.

Catur Laswanto
Asisten Kesra Pemprov DKI Jakarta

Untuk Siswa Terdampak Corona

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta menyiapkan Rp171 miliar untuk membantu siswa yang terdampak Covid-19 dan harus mengenyam pendidikan di sekolah swasta.

Saat ini, kata Asisten Kesejahteraan Rakyat (Askesra) DKI Catur Laswanto di Jakarta, Pemprov DKI Jakarta sedang menyusun skema bantuan bagi siswa SMP, SMA, SMK yang tidak lolos seleksi pendaftaran PPDB dan terpaksa masuk sekolah swasta pada Tahun Ajaran 2020/2021.

Pemprov DKI sedang mencocokkan antara siswa yang tak lolos PPDB dan data penerima bansos virus corona supaya bantuan yang diberikan tepat sasaran.

Dari data PPDB, siswa yang tidak diterima di sekolah negeri DKI akan dipadankan dengan data penerima bansos. Data yang dicocokkan adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) orang tua yang terdampak wabah corona.

“Kenapa kami padankan? Karena asumsinya adalah ketika nanti diberikan bantuan uang masuk atau uang pangkal sekolah, maka mereka adalah yang layak dan terdampak COVID-19,” ujar Catur, Senin (20/7/2020).

Pada pendaftaran PPDB 2020, jumlah siswa yang mendaftar sebanyak 358.664 dan yang sudah diterima di negeri 232.653 siswa. Sedangkan yang tidak

diterima di sekolah negeri ada 126.011.

“Lalu, hasil padanan data antara data PPDB yang tidak diterima di negeri, artinya mereka diterima di swasta dan data bansos adalah 85.508. Data ini tidak termasuk mereka yang langsung daftar ke sekolah swasta,” kata dia.

Dari jumlah siswa, asumsi anggaran diperkirakan untuk menalangi uang pangkal masuk sekolah swasta sebesar Rp171 miliar. Sumber dana yang digunakan masih belum diputuskan, bisa menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD) 2020 atau Bantuan Tak Terduga (BTT).

“Karena sekolah swasta memberikan kesempatan perpanjangan pembayaran. Artinya tidak pada saat sekarang, tetapi di waktu yang panjang sehingga sekiranya anggaran akan dibebankan APBD, masih dimungkinkan,” imbuh Catur.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Nahdiana menyampaikan bahwa uang pangkal untuk masuk sekolah swasta di Jakarta memang berbeda-beda dengan kisaran biaya dari Rp1 - 4 juta.

Sejauh ini, Pemprov DKI belum memutuskan besaran bantuan yang diterima setiap siswa. Namun total anggaran sebesar Rp171 miliar hampir dipastikan bisa disanggupi Pemprov DKI.

Bantu Siswa Tak Mampu

Bantuan pendidikan juga ditujukan bagi siswa tidak mampu dan tak berkesempatan masuk sekolah negeri sehingga harus masuk ke sekolah swasta.

Sejumlah bantuan tersebut, kata Catur, yakni untuk meringankan dengan menggratiskan uang pangkal dan uang masuk sekolah agar anak-anak dari keluarga yang memiliki kesulitan ekonomi

bisa melanjutkan pendidikan.

“Disdik akan melakukan penjangkauan sebagaimana yang telah disampaikan Bapak Sekda bahwa terdapat kelompok masyarakat yang mereka karena kesulitan ekonomi bisa saja tidak mau mendaftar atau tidak mau sekolah atau belum sekolah,” kata Catur dalam rekaman video rapim bantuan biaya sekolah swasta yang disiarkan Pemprov DKI.

Catur memastikan, Pemprov DKI akan mendata para calon siswa yang belum mendapat kesempatan saat PPDB ini. “Disdik dengan tim akan melakukan penjangkauan dan pendampingan kepada siswa-siswa

untuk memastikan bahwa tidak ada anak yang tidak bersekolah di DKI Jakarta,” tambah dia.

Catur menyampaikan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan Disdik DKI untuk meringankan yang masuk bagi calon siswa yang terdampak COVID-19 dengan menerbitkan Surat Edaran Dinas Pendidikan No. 57/2020.

Dia menjelaskan, sekolah swasta tak membebani warga terutama biaya pendidikan di awal tahun pelajaran atau biaya pendidikan lainnya.

“Disdik juga sudah melakukan pertemuan beberapa kali dengan Badan Musyawarah Pendidikan Swasta (BMPS), dari

hasil pertemuan itu dapat kami sampaikan adanya komitmen bahwa sekolah-sekolah swasta akan tetap menampung siswa yang secara keuangan mengalami kendala,” ucap Catur.

Keringanan yang diberikan adalah keringanan yang pangkal untuk calon siswa yang tak mampu, termasuk memberikan keringanan waktu pembayaran.

“Dari diskusi dengan BMPS mereka akan tetap menampung dan memberikan kesempatan mereka mencil uang pangkalnya kalau mereka mengalami kesulitan melakukan pembayaran secara langsung,” kata dia. (ibl)